

# LAPORAN

## HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI

### DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang  
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari  
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi  
Pemerintah



TRIWULAN II  
TAHUN 2023

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN**

**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**PENGGUNA LAYANAN**

**DI DIREKTORAT JENDERAL**

**BADAN PERADILAN UMUM**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 90 Tahun 2021

**Disahkan di Jakarta**  
**Pada Hari Rabu, 12 Juli 2023**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Jakarta, 12 Juli 2023

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran.....	2
D. Landasan Hukum .....	2
E. Definisi .....	3
<b>BAB II. METODOLOGI</b>	
A. Metode Penelitian .....	4
B. Populasi Dan Sampel.....	4
C. Pelaksanaan dan Teknik Survei.....	5
D. Teknik Analisis dan Evaluasi.....	5
E. Tim Survei IPAK.....	6
F. Prosedur Survei .....	6
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>	
A. Profil Responden .....	8
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja .....	20
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	23
B. Rekomendasi .....	23
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden .....	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden .....	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden .....	10
Tabel 4. Domisili Responden .....	11
Tabel 5. Usia Responden .....	12
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	13
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	15
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah.....	16
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan .....	17
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	18
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	19
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum .....	20
Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderalla Badan Peradilan Umum .....	21

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	10
Grafik 4. Domisili Responden.....	12
Grafik 5. Rentang Usia Responden .....	13
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	15
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh.....	16
Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah.....	17
Grafik 10. Indikator Percaloan.....	18
Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang .....	19
Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	21

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**B. Tujuan**

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi anti korupsi dari pengguna layanan terhadap Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

**C. Sasaran**

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

**D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

## **E. Definisi**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

## BAB II METODOLOGI

### A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparatur peradilan pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 17.000 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden minimal sebanyak 375 orang.

## C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan masyarakat yang menerima pelayanan selama periode triwulan II Tahun 2023. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

### 1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey

### 2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Ditjen Badilum.
- b) Mengunggah surat pengisian data e-survey kepada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan masyarakat yang telah menerima layanan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada website (surat terlampir).
- c) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E-survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- d) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

## D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling

tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring/angka* absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

#### E. TIM SURVEI IPAK

Tim Survei IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Candra, S.H.	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola	Penanggung jawab
2	Achmad Basyari, S.E.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Ketua
3	Tietie Pudji Utami, S.Pd, S.H.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera Dan Juru Sita	Anggota
4	Hery Suganda Silalahi, S.Kom.	Kepala Seksi Peninjauan Kembali	Anggota
5	Ratna Sari, S.H.	Staf Sub. Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran	Anggota
6	Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T.	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi	Anggota
7	Muhamad Wakhid, SE, .SH.,MM.	Staf Pada Subbagian Penyusunan Laporan keunagan	Anggota
8	Yusriyyah,A.Md.T	Staf Sub. Bagian Perlengkapan	Anggota
9	Dodon Angin Wiyono, S.Kom.	Staf Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota

#### F. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur,

jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telpn dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Hadiah
5. Percaloan
6. Perbuatan Curang
7. Transaksi Rahasia

### BAB III

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

### A. Profil Responden

#### 1. Jenis Kelamin Responden

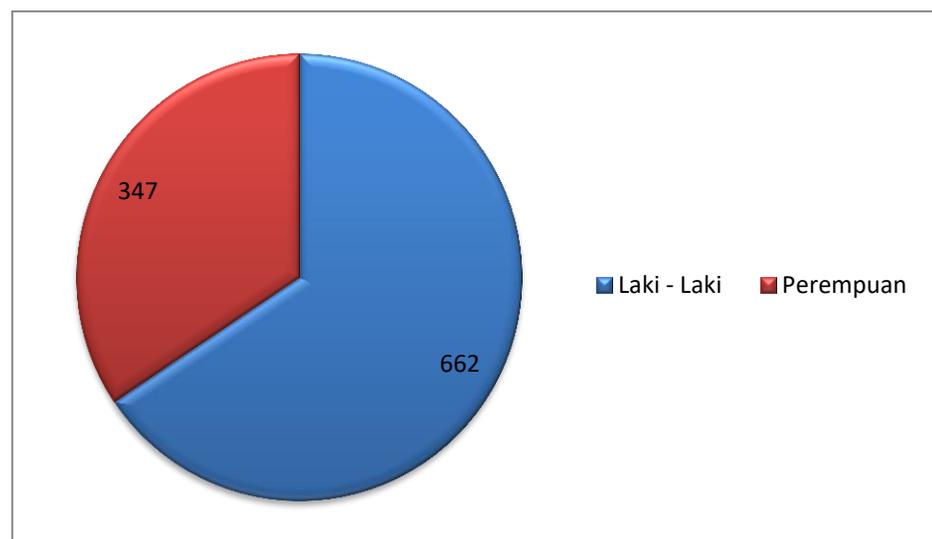
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 1.009 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 662 orang atau 65,61% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 347 orang atau 34,39%.

**Tabel Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	662	65,61
2	Perempuan	347	34,39
Jumlah		1.009	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

**Grafik Jenis Kelamin Responden**



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

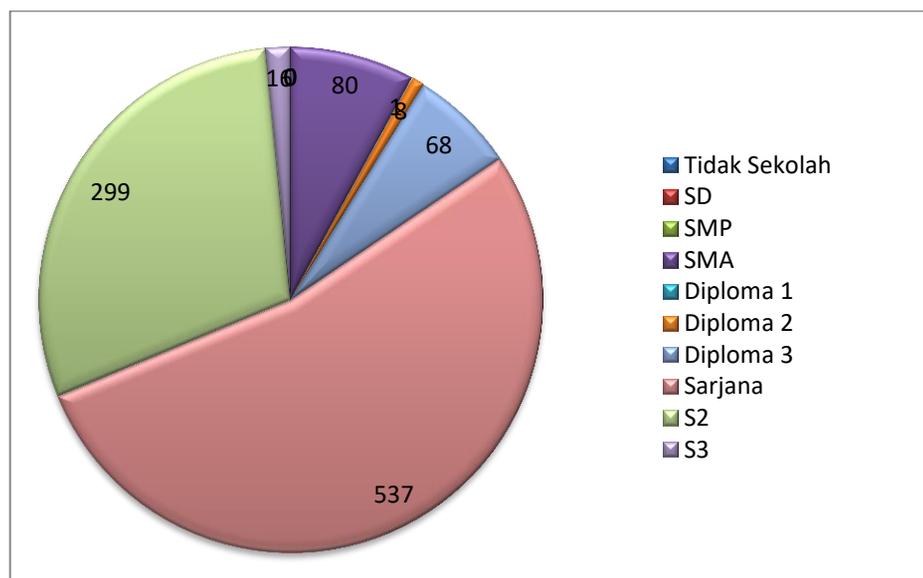
#### 2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan Sarjana.

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	80	7,93
5	Diploma 1	1	0,10
6	Diploma 2	8	0,79
7	Diploma 3	68	6,74
8	Sarjana	537	53,22
9	S2	299	29,63
10	S3	16	1,59
Jumlah		1.009	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

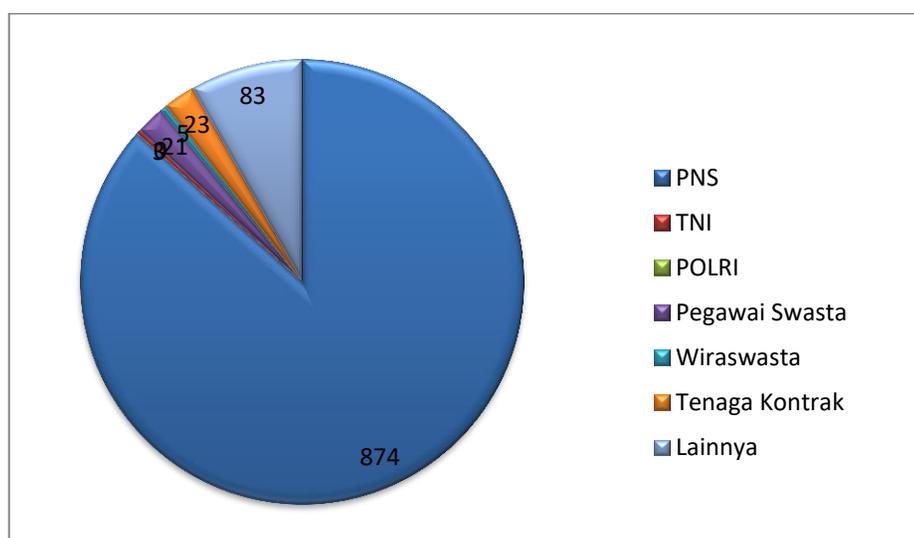
### 3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 86,62% responden atau mayoritas pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki pekerjaan sebagai PNS.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	874	86,62
2	TNI	3	0,30
3	POLRI	0	0
4	Pegawai Swasta	21	2,08
5	Wiraswasta	5	0,50
6	Tenaga Kontrak	23	2,28
7	Lainnya	83	8,23
Jumlah		1.009	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



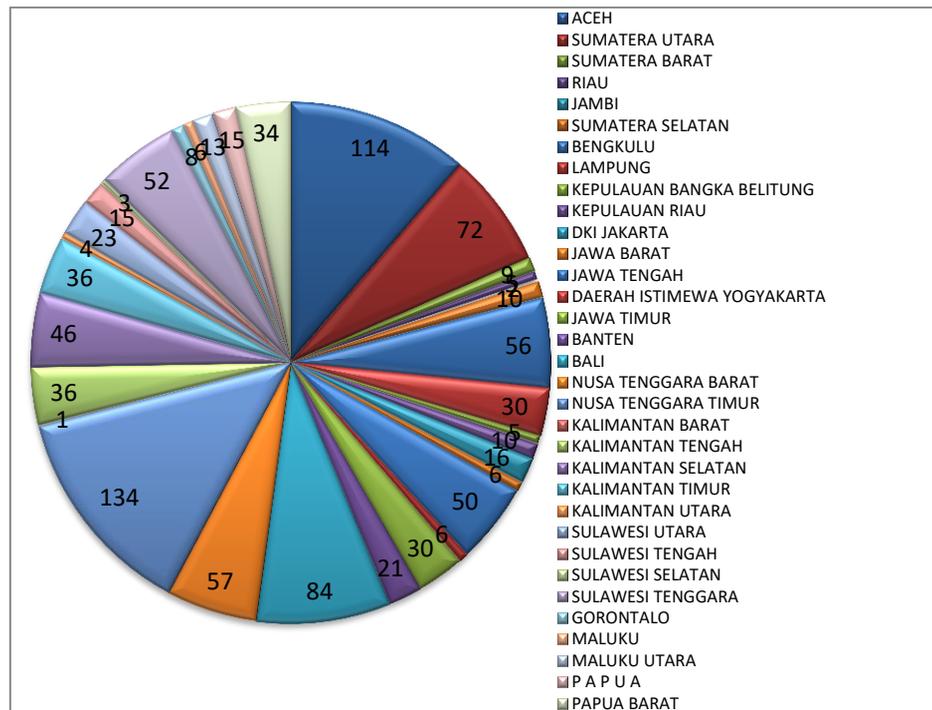
Grafik 3. Pekerjaan Responden

#### 4. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari jumlah 34 Provinsi di seluruh Indonesia, domisili pengguna layanan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total responden sebanyak 134 orang.

<b>NO</b>	<b>Daerah Domisili</b>	<b>Jumlah ( Orang )</b>
1	ACEH	114
2	SUMATERA UTARA	72
3	SUMATERA BARAT	9
4	RIAU	5
5	JAMBI	2
6	SUMATERA SELATAN	10
7	BENGGKULU	56
8	LAMPUNG	30
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5
10	KEPULAUAN RIAU	10
11	DKI JAKARTA	16
12	JAWA BARAT	6
13	JAWA TENGAH	50
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6
15	JAWA TIMUR	30
16	BANTEN	21
17	BALI	84
18	NUSA TENGGARA BARAT	57
19	NUSA TENGGARA TIMUR	134
20	KALIMANTAN BARAT	1
21	KALIMANTAN TENGAH	36
22	KALIMANTAN SELATAN	46
23	KALIMANTAN TIMUR	36
24	KALIMANTAN UTARA	4
25	SULAWESI UTARA	23
26	SULAWESI TENGAH	15
27	SULAWESI SELATAN	3
28	SULAWESI TENGGARA	52
29	GORONTALO	8
30	MALUKU	6
31	MALUKU UTARA	13
32	P A P U A	15
33	PAPUA BARAT	34
	<b>TOTAL</b>	<b>1.009</b>

Tabel 4. Domisili Responden



Grafik 4. Domisili Responden

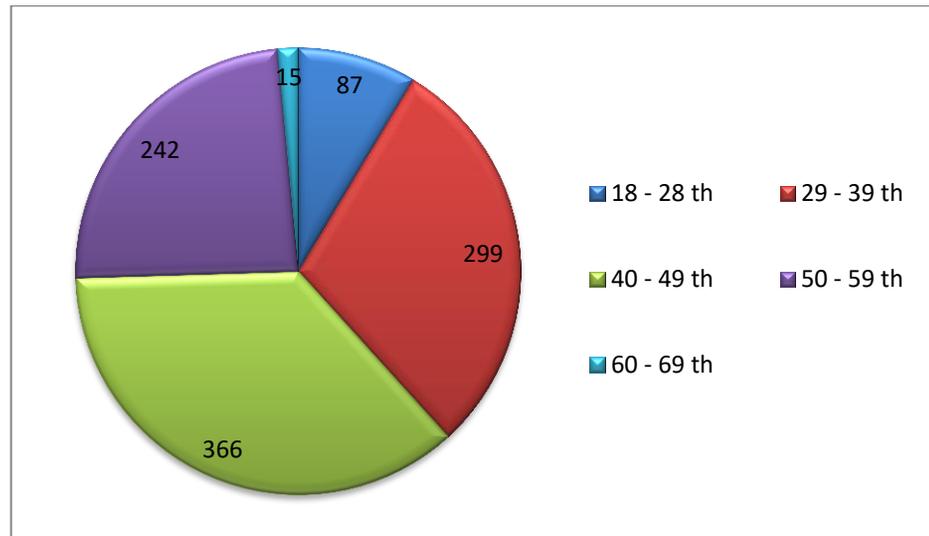
5. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 40 – 49 Tahun dengan prosentase sebesar 36,31% dari total responden.

No	Rentang Usia	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	18 - 28 th	87	8,63
2	29 - 39 th	299	29,66
3	40 - 49 th	366	36,31
4	50 - 59 th	242	24,01
5	60 - 69 th	15	1,39
Jumlah		1.009	100

Tabel 5. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

## B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

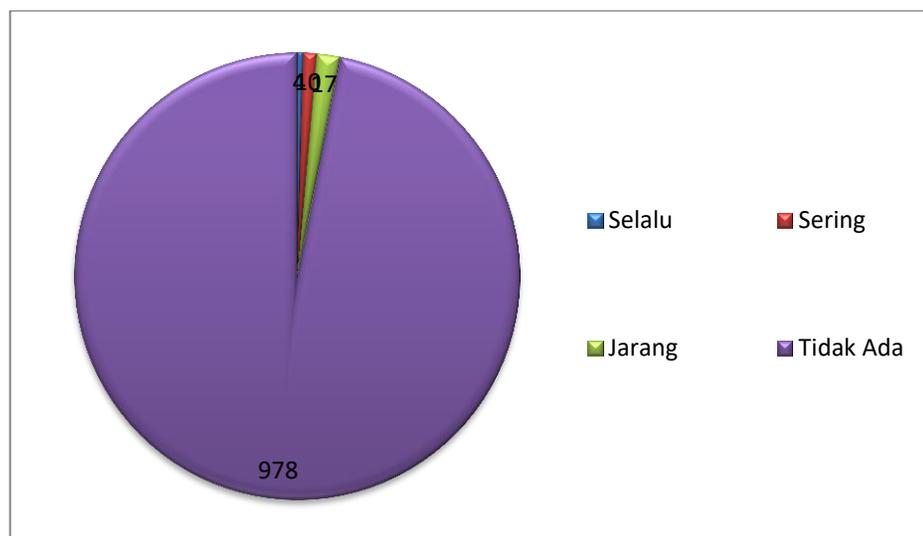
### 1. Manipulasi Peraturan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan menunjukkan hasil 96,93% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manipulasi peraturan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	4	0,40
2	Sering	2	10	0,99
3	Jarang	3	17	1,68
4	Tidak Ada	4	978	96,93
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan

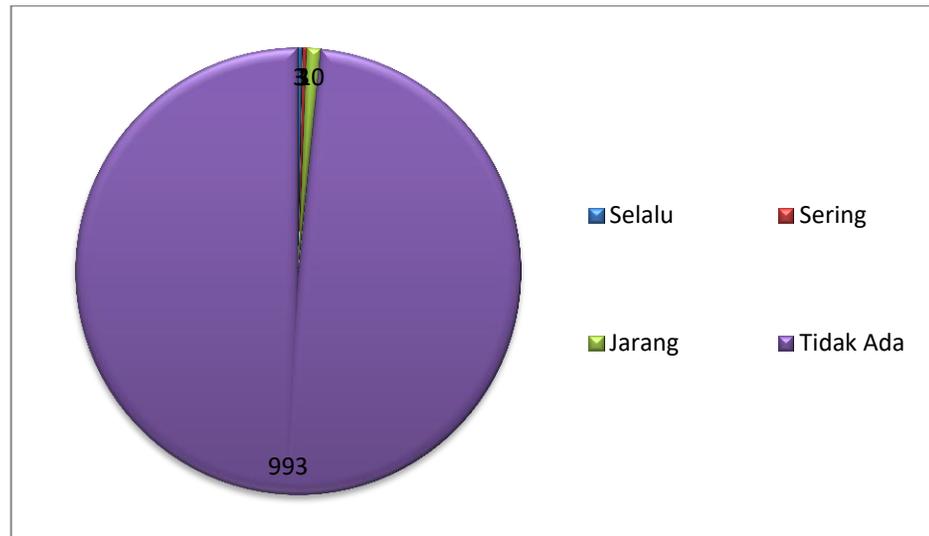
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil 98,41% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	3	0,30
2	Sering	2	3	0,30
3	Jarang	3	10	0,99
4	Tidak Ada	4	993	98,41
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

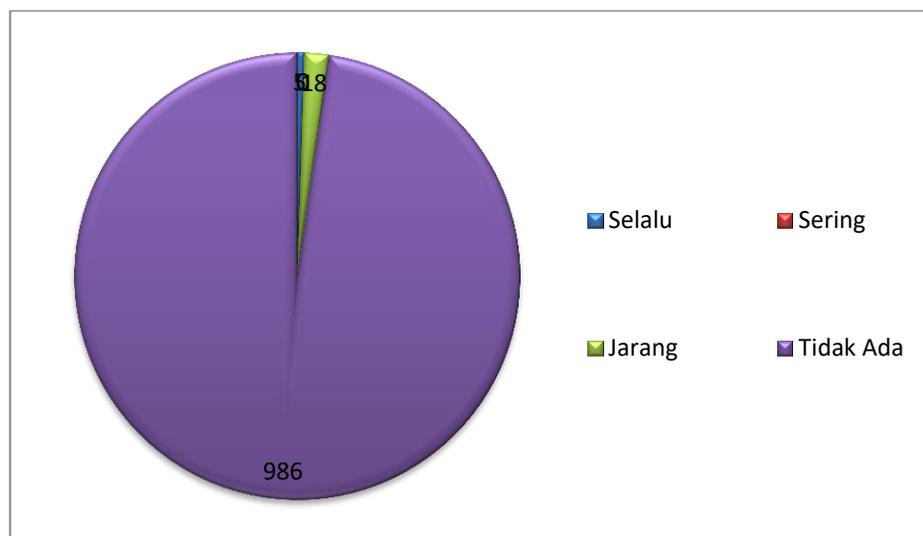
### 3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil 97,72% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat menjual pengaruh pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	5	0,50
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	18	1,78
4	Tidak Ada	4	986	97,72
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh

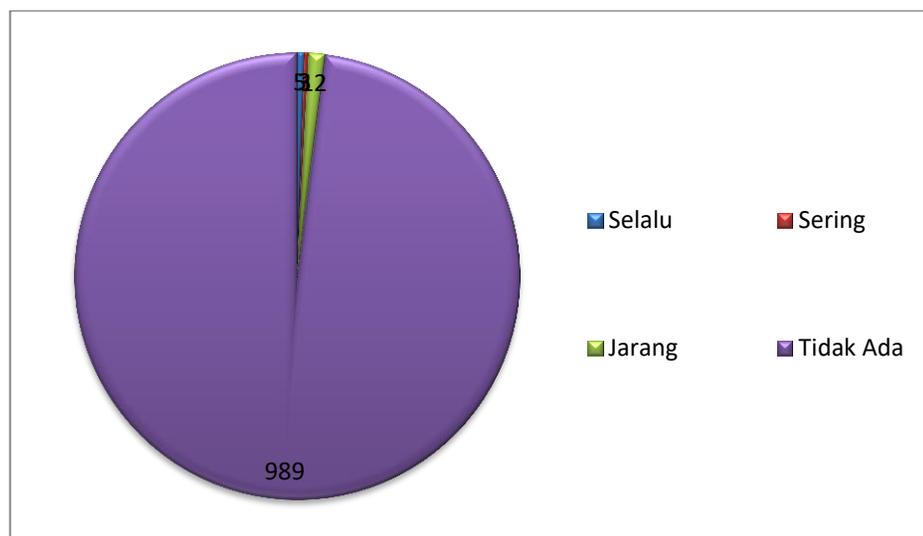
4. Indikator Pemberian Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator pemberian hadiah menunjukkan hasil 98,02% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	5	0,50
2	Sering	2	3	0,30
3	Jarang	3	12	1,19
4	Tidak Ada	4	989	98,02
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah

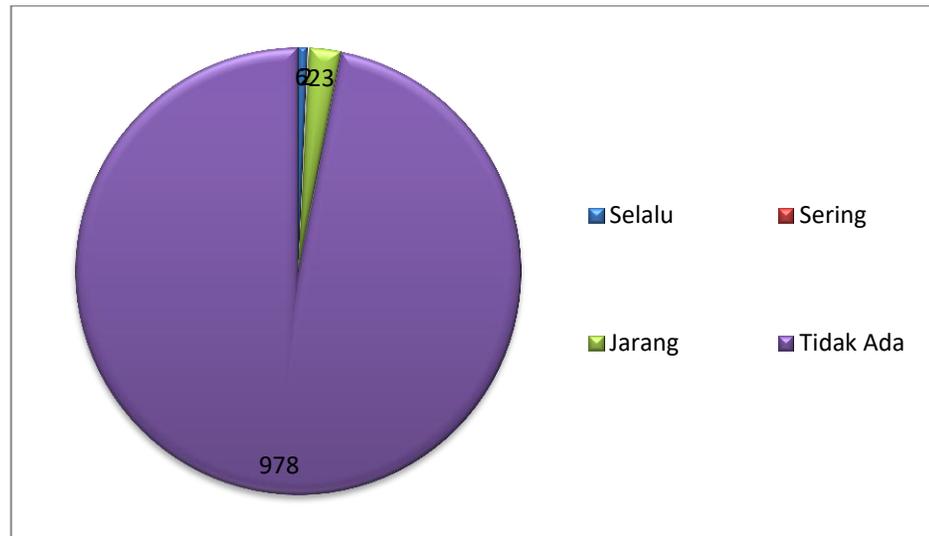
#### 5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator percaloan menunjukkan hasil 96,93% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat percaloan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	6	0,59
2	Sering	2	2	0,20
3	Jarang	3	23	2,28
4	Tidak Ada	4	978	96,93
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 10. Indikator Percaloan

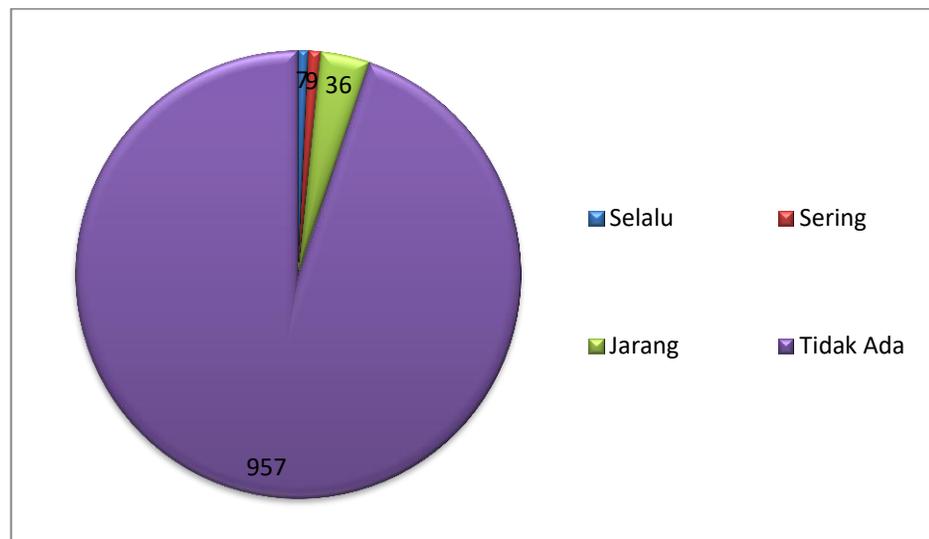
#### 6. Indikator Perbuatan Curang

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang menunjukkan hasil 94,85% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbuatan curang pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	7	0,69
2	Sering	2	9	0,89
3	Jarang	3	36	3,57
4	Tidak Ada	4	957	94,85
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang

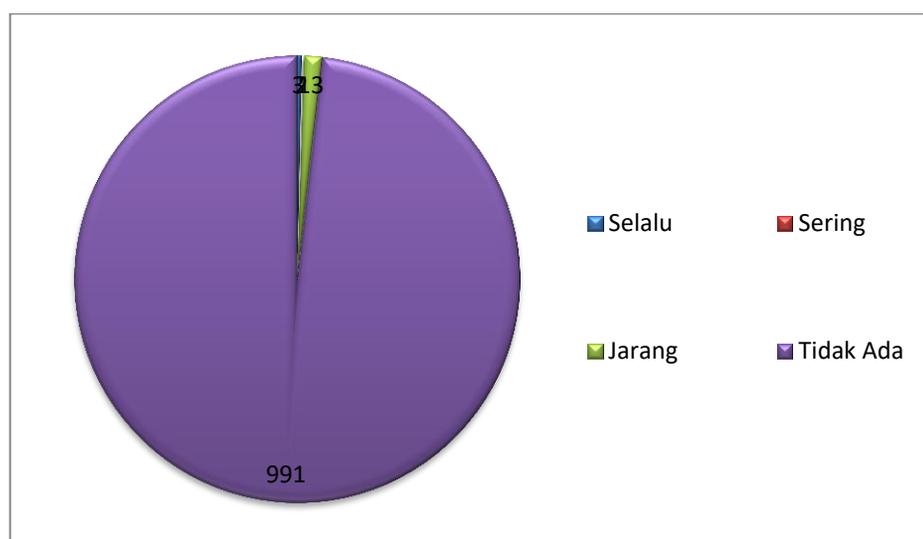
#### 7. Indikator Transaksi Rahasia

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia menunjukkan hasil 98,22% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat transaksi rahasia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	3	0,30
2	Sering	2	2	0,20
3	Jarang	3	13	1,29
4	Tidak Ada	4	991	98,22
Jumlah			1.009	100,00

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia

### C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 7 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 3,96.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata – Rata	Ranking
Q <sup>1</sup>	Manipulasi Peraturan	3,951	6
Q <sup>2</sup>	Penyalahgunaan Jabatan	3,975	1
Q <sup>3</sup>	Menjual Pengaruh	3,967	3
Q <sup>4</sup>	Hadiah	3,967	4
Q <sup>5</sup>	Percaloan	3,955	5
Q <sup>6</sup>	Perbuatan Curang	3,926	7
Q <sup>7</sup>	Transaksi Rahasia	3,974	2
Jumlah		3,96	

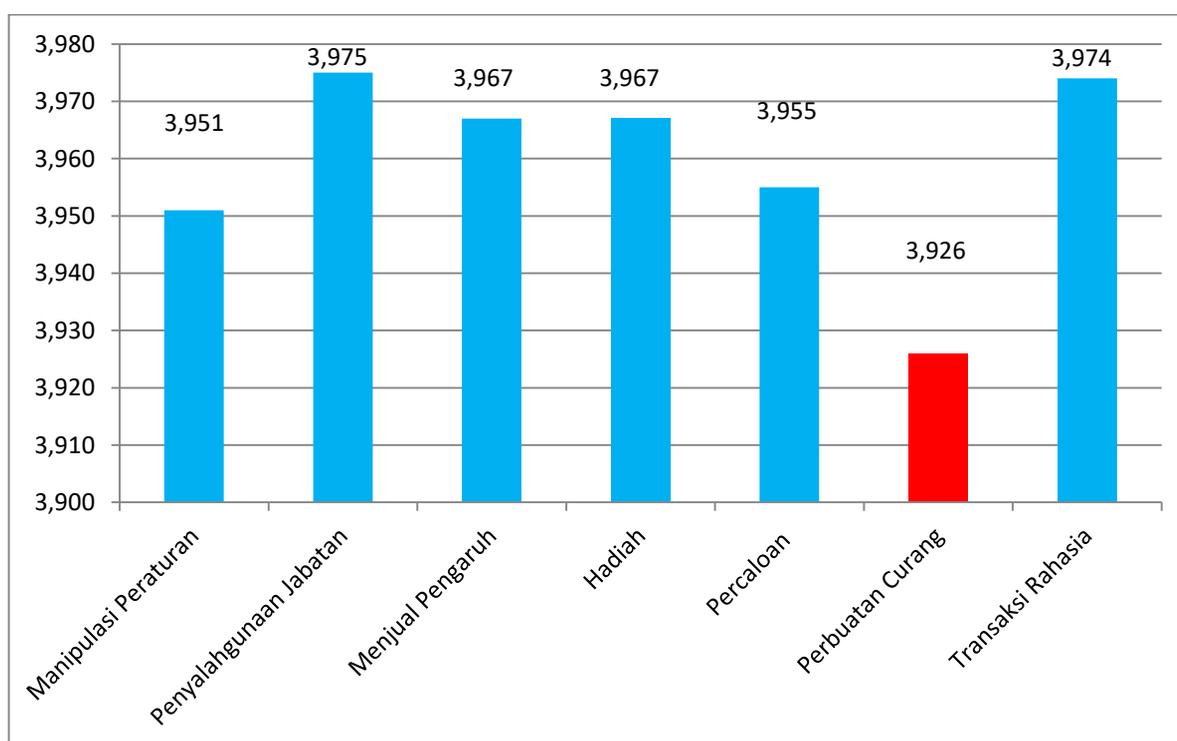
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

#### D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 3,96 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 98,99% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,96** atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya, dari Nilai IPAK yang telah diperoleh dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum **bebas dari korupsi**.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu, **Perbuatan Curang, Manipulasi Peraturan dan Percaloan** yang dinilai cukup bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan

### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey IPAK terhadap pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka perlu upaya untuk memperbaiki **Perbuatan Curang, Manipulasi Peraturan dan Percaloan** sehingga proses pemberian layanan akan terpantau dalam semua tahapan.

Untuk memperbaiki indikasi **perbuatan curang** direkomendasikan:

- Masing-masing Pejabat Eselon II dan III untuk lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Untuk memperbaiki indikasi **manipulasi peraturan** direkomendasikan:

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar melakukan inventarisir terhadap aturan – aturan yang telah dikeluarkan untuk dilakukan harmonisasi dengan aturan di atasnya.

Untuk memperbaiki indikasi **percaloan** direkomendasikan:

- Masing-masing Pejabat Eselon II dan III memastikan bahwa layanan yang telah diberikan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya laporan dan rekomendasi ini akan dibahas pada rapat pimpinan.

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
BULAN APRIL 2023 SAMPAI DENGAN JUNI 2023.**

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NILAI INDEKS

**3,96 / 98,99 %**

Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

JUMLAH	1009 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 662 ORANG	
	PEREMPUAN : 347 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 8 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 68 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 537 ORG
	SMU : 80 ORG	S2 : 299 ORG
	Diploma 1 : 1 ORG	S3 : 16 ORG
PEKERJAAN	PNS : 874 ORG	SWASTA : 21 ORG
	TNI : 3 ORG	WIRUSAHA : 5 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 23 ORG
	LAINNYA : 83 ORG	

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR  
TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	Keterangan
Jumlah	3987	4011	4003	4003	3991	3961	4010	
NRR Per RL	3,951	3,975	3,967	3,967	3,955	3,926	3,974	27,717
NRR Tertimbang	0,564	0,568	0,567	0,567	0,565	0,561	0,568	3,960
IPAK Unit Pelayanan								3,96

**EVALUASI NILAI UNSUR**

3 Unsur Terendah      3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Ditjen Badilum? (Perbuatan Curang)	3961
2	Apakah pemberian layanan dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	3987
3	Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Ditjen Badilum? (Percaloan)	3991

# KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

- 1 Data Responden**  
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidik...
- 2 Form Kuesioner**  
isian form kuesioner IPA
- 3 Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

## Data Responden IPA

**Nama**

**Umur / Jenis Kelamin \***   Minimal 18 Tahun

**Nomor HP \***  Contoh : 81211112222

**Domisili \***

**Pendidikan \***

**Pekerjaan \***

**Layanan \***

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Dashboard SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPA

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

- 1 Data Responden**  
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidik...
- 2 Form Kuesioner**  
isian form kuesioner IPA
- 3 Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

1 Apakah pemberian layanan dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

2 Apakah layanan pada Ditjen Badilum diberikan dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

3 Pernahkah Bapak/Ibu/Saudara() dihubungi oleh pegawai Ditjen Badilum yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas tertentu? (Menjual Pengaruh)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

4 Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (Hadiah)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

5 Apakah Bapak/Ibu/Saudara() pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Ditjen Badilum? (Percaloan)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

6 Apakah Bapak/Ibu/Saudara() pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Ditjen Badilum? (Perbuatan Curang)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

7 Apakah Bapak/Ibu/Saudara() pernah mengurus surat/berkas tertentu melalui pegawai Ditjen Badilum diluar kantor? (Transaksi Rahasia)

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 0.0244, Penggunaan Memori : 0.88MB